BAB IV

PEMBERONTAKAN *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA* (ISIS) DI IRAK SERTA KEPENTINGAN POLITIK-KEAMANAN DAN EKONOMI AMERIKA SERIKAT

Pada periode 2006-2014, keberadaan Timur-tengah masih memiliki peranan yang sangat penting bagi Amerika Serikat. Intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS di Irak ternyata menunjukkan bahwa negara adikuasa ini memiliki kepentingan yang begitu besar dalam kasus ini. Kepentingan ini meliputi bidang politik dan keamanan, serta ekonomi.

Kepentingan keamanan dibalik Intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS di Irak berkaitan dengan upaya negara adikuasa ini dalam memerangi terorisme, sebagai bagian dari pencapaian stabilitas militer Irak yang dianggap berkaitan dengan stabilitas kawasan Timur-Tengah. Kemudian pada bidang politik intervensi Amerika Serikat tersebut merupakan bagian dari upaya menegakan supremasi demokrasi dan HAM, sesuai dengan telah diamanatkan oleh para founding father Amerika Serikat.

Motivasi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS di Irak selanjutnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, yaitu mempertahankan dan memajukan ekspor-impor negara ini karena sebagian besar produk-produk ekspor-impor dijalankan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Irak. Ini disebabkan karena pasca tergulingnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2006, banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang berupaya mengembangkan binisnya, sekaligus mengembangkan ekspor-impor di Irak. Pada bab IV ini akan diuraikan tentang kepentingan Amerika Serikat bidang politik, keamanan dan ekonomi sebagai motivasi dalam menangani pemberontakan ISIS di Irak.

A. Kepentingan Politik dan Keamanan Amerika Serikat Dalam Mendukung Penanganan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Irak

Menegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengembangan demokrasi dan HAM menjadi bagian penting dari tujuan politik luar negeri Amerika Serikat. Pasca kemenangannya pada era perang dingin, mendorong Amerika Serikau berupaya untuk mengembangkan demokrasi dan HAM sebagai nilai kebenaran internasional yang diamanatkan oleh para tokoh pendiri Amerika Serikat. Tujuan pokok (tujuan ideologis) dari politik luar negeri Amerika Serikat, baik secara konseptual ataupun kontekstual menurut Departemen Urusan Dalam Negeri Amerika Serikat (*United States Departement of States*) adalah sebagai berikut :

> ”*…sesuai dengan tokoh pendiri negara ini (founding father) maka Amerika Serikat perlu berinteraksi dengan negara lain, bukan hanya untuk kepentingan domestik namun juga seluruh negara dunia. Tujuan politik luar negeri Amerika Serikat adalah untuk menciptakan lebih aman, demokratis dan sejahtera untuk kepentingan Amerika Serikat dan dunia*.”[1]

Demokrasi menjadi faham yang begitu penting bagi masa depan Irak. Untuk itulah, pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein Amerika Serikat berupaya mengembangkan demokrasi dan HAM di Irak. Dengan adanya pemberontakan ISIS yang berada pada pncaknya pada akhir tahun 2012 hingga 2014, maka keberadaannya akan mengangg agenda penegakan HAM dan demokrasi di Irak.

Bagi Amerika Serikat, demokrasi di Irak pasca invasi tahun 2013-2014 adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas kekuasaan negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pilar demokrasi yang biasa kita kenal adalah *prinsip trias politica*, dimana membagi ketiga kekuasaan politik

---

[1] “Priorities and Result of US Departement of Stetes Foreign Policy”, dalam http://www.state.gov/r/pa/scp/fs/2010/145610.htm, diakses pada tanggal 12 Februari 2015.

negara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dalam mewujudkan ketiga jenis lembaga negara yang bersifat independen dan berada dalam kesejajaran satu sama lain, diharapkan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengontrol dan mengawasi sehingga mekanisme ini akan dapat membangun sistem politik-pemerintahan yang efektif.[2]

Merebaknya pemberontakan ISIS pada tahun 2012-2014 ternyata menyebabkan pola pengembangan demokasi dan supremasi HAM menjadi terhambat. Sebelumnya di tahun 2007, pasca tergulingnya Saddam Hussein, pihak Amerika Serikat telah merencanakan pengembangan Irak sebagai negara demokratis di Timur-Tengah. Upaya ini ditempuh agar dapat terbentuk sebuah pembangunan politik-pemerintahan secara cepat dan mendapat legitimasi/pengakuan dari masyatakat mayoritas Irak.[3]

Pasca invasi pasukan multinasional di bawah pimpinan Amerika Serikat pada tahun 2003/2004 ternyata indeks demokrasi, kebebasan sipil dan HAM Irak cenderung mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa tergulingnya rezim Saddam Hussein berhasil membuka harapan bar bagi Irak sebagai negara yang berkembang ke arah Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Indeks Demokrasi, HAM dan Kebebasan Sipil Irak
Periode 2004-2008

No.	Tahun	Indeks
1.	2004	3.4
2.	2005	3.5
3.	2006	3.6
4.	2007	3.8
5.	2008	3.9

[2] Ibid.
[3] "Masa Depan Irak Pasca Invasi : Bagian III Habis", Republika, 28 November 2008.

Sumber : Anonim, “The Freedom Public, Human Rights and Democracy in Iraq After Invantion”, Journal of Public Policy, Vol VII, University of Cambridge, Cambridge, 2013, hal.9.

Melalui tabel 4.1. di atas maka dapat difahami bahwa sejak tahun 2004 indeks demokrasi, kebebasan sipil dan HAM Irak berhasil mengalami tren peningkatan. Indeks maksimal ini adalah 10 dan beberapa parameter yang masuk adalah keterlibatan publik, akuntabilitas pemerintah, kebijakan keamanan, perlindungan sipil dan lain-lainnya. Dengan adanya pemberontakan ISIS sejak tahun 2008 dan berada pada puncaknya di tahun 2013/2014 maka ini akan menganggu perkembangan demokrasi dan supremasi HAM yang telah dipromosikan oleh Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari indeks demokrasi, kebebasan sipil dan HAM Irak yang ternyata mengalami penurunan bersamaan dengan pemberontakan ISIS, seperti yang tercantum pada tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Indeks Demokrasi, HAM dan Kebebasan Sipil Irak
Periode 2009-2013

No.	Tahun	Indeks
1.	2009	3.8
2.	2010	3.8
3.	2011	3.5
4.	2012	3.4
5.	2013	3.4

Sumber : Anonim, “The Freedom Public, Human Rights and Democracy in Iraq After Invantion”, Journal of Public Policy, Vol VII, University of Cambridge, Cambridge, 2013, hal.9.

Dari tabel tersebut maka dapat difahami bahwa pemberontakan ISIS ternyata dapat menganggu agenda pembangunan demokrasi dan HAM Amerika Serikat di Irak. Berbagai even politik, pembicaraan, lobi hingga kebijakan-kebijakan pembangunan banyak yang tidak

terealisasi akibat gangguan dari pemberontakan ini. Dan bisa dilihat pada tabel diatas indeks kebebasan sipil dan HAM pada tahun 2004 dan 2013 mengalami persamaan oleh karena itu pihak Amerika Serikat merasa sia-sia dengan usahanya membangun demokrasi dan penegakan HAM di Irak.

B. Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat Dalam Mendukung Penanganan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Irak

Kepentingan ekonomi menjadi salah satu alasan pokok Amerika Serikat untuk menolak gangguan keamanan internasional yang berdampak buruk pada eksistensi kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Sekitar 58 persen perekonomian nasional negara ini ditopang oleh sektor industri. Masalah yang muncul adalah menyangkut tingkah laku dan sikap politik pemerintah Amerika Serikat itu sendiri. Sebagian elit politik Amerika Serikat sendiri menganggap bahwa perekonomian nasional negara ini akan terganggu jika, Amerika Serikat meratifikasi rezim pemanasan global secara elementer.

Pada periode kepemimpinan George Walker Bush hingga Barack Obama, politik luar negeri Amerika Serikat didukung oleh anggaran nasional yang luar biasa besar, yaitu :[4]

a. Jangkauan global bidang perekonomian yang jumlahnya sebesar 14,3 triliun US Dollar.

b. Jangkauan global bidang pertahanan yang jumlahnya sebesar 711 milyar US Dollar.

Tujuan praktis, dari politik luar negeri Amerika Serikat adalah seperti halnya dengan negara-negara lainnya di dunia, yaitu :[5]

a. Kontrol ekspor-impor.

b. Lengkah terdepan untuk membina hubungan baik dengan negara-negara dunia.

---

[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*

c. Menjaga bisnis dan usaha, baik nasional ataupun swasta Amerika Serikat di luar negeri.

d. Memberikan perlindungan bagi warga Amerika Serikat di luar negeri.

Beberapa MNC yang menjadi subyek penetrasi perdagangan luar negeri Amerika Serikat di Irak tahun 2006-2014, antara lain :[6]

a. GM (*General Motors*) sebagai perusahaan kendaraan dan suku cadang kendaraan.

b. AT&T sebagai perusahaan multinasional yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi.

c. Global Petro America sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan minyak bumi.

d. Fluor Corporation sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan minyak bumi dan retail.

e. Parson Corporation sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan.

f. AECOM Technology sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan telekomunikasi.

g. Petrol Ofisi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan minyak bumi.

h. Ronco Consulting sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.

Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir, sedangkan orang yang melakukan

[6] "Industri-Industri Utama AS, Enggan Dukung Refulasi UNFCCC", *Kompas*, 10 Mei 2010.

kegiatan impor disebut importir. Kegiatan ekspor (menjual barang ke luar negeri) dapat menghasilkan devisa bagi negara. Devisa adalah masuknya uang asing ke negara kita. Uang asing yang masuk ke negara kita tersebut dapat kita gunakan untuk membayar barang- barang dan jasa dari luar negeri (barang impor).

Di Irak kegiatan ekspor impor dilakukan antarnegara untuk mencukupi kebutuhan rakyat masing-masing negara. Indonesia mengimpor barang dari luar negeri karena kita tidak dapat menghasilkan barang tersebut ataupun jika kita dapat menghasilkan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan kita mengekspor barang ke luar negeri karena negara lain membutuhkan barang dan jasa yang kita hasilkan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri mereka.

Secara umum produk ekspor dan impor di Irak ternyata berkembang seperti halnya kelompok negara-negara di dunia yang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Barang migas (minyak dan gas)
2. Barang non migas yaitu barang-barang yang bukan minyak bumi dan gas seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, kerajinan dan hasil pertambangan lain yang bukan minyak dan gas.
3. Jasa yaitu pengiriman tenaga kerja ke laur negeri.

Akibat pemberontakan yang dilancarkan ISIS, nilai ekspor migas Irak cenderung mengalami tren penurunan pada tahun 2006-2014. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Perkembengan Ekspor Migas Irak Tahun 2006-2014

No.	Tahun	Jumlah/Kuantitas Total

		(Milyar US Dollar)
1.	2006	4.90
2.	2007	4,82
3.	2008	5.26
4.	2009	6.28
5.	2010	4.00
6.	2011	4.85
7.	2012	3.19
8.	2013	3,11
9.	2014	3,91

Sumber : "Iraq IRQ Profil Export Economy", dalam h http://atlas.media.mit.edu/profile/country/irq/, diakses pada tanggal 13 Maret 2015 dan Anonim, Iraq Business and Trade Directory, Baghdat and London, 2014.

Melalui tabel 4.3. di atas maka dapat difahami bahwa pemberontakan ISIS telah menyebabkan penurunan bagi dinamika ekspor negara ini. Perekonomian Irak memang tidak bisa dilepaskan dari-impor, khususnya komoditas minyak bumi. Sejak tahun 2008, Amerika Serikat menjadi tujuan utama dari ekspor Irak, dimana hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :[7]

a. Ekspor Irak ke Amerika Serikat berjumlah 21,1% dari total ekspor.

b. Ekspor Irak ke India berjumlah 20,0% dari total ekspor.

c. Ekspor Irak ke Cina berjumlah 13,6% dari total ekspor.

d. Ekspor Irak ke Korea Selatan berjumlah 11,0% dari total ekspor.

e. Ekspor Irak ke Kanada berjumlah 4,7% dari total ekspor.

f. Ekspor Irak ke Italia berjumlah 4,4,% persen dari total ekspor.

Tabel 4.4

Jumlah Penurunan Ekspor Minyak Irak ke Amerika Serikat

[7] "Iraq Economy", dalam http://www.heritage.org/index/country/iraq, diakses pada tanggal 28 Maret 2015.

Tahun Ekspor	Jumlah Ekspor(Barrell)
2008	139.000
2009	140.000
2010	142.000
2011	143.000
2012	43.000
2013	30.000
2014	23.000

Bagi Amerika Serikat ekspor minyak dari Irak menjadi hal yang sangat penting bagi kebutuhan dalam negeri negara adikuasa ini. Seperti yang terlihat pada tabel diatas pada tahun 2008, ekspor minyak dari Irak ke Amerika Serikat mencapai 139 ribu barrell dan di tahun 2010 meningkat menjadi 142 ribu barell. Jumlah ini diperkirakan mencukupi sekitar 34 hngga 38 total kebutuhan minyak di Amerika Serikat. Munculnya pemberontakan ISIS pada tahun 2012-2014 ternyata mempu menurunkan nilai ekspor minyak menjadi kurang dari 98 ribu barell. Angka ini merupakan minyak setengah jadi dan minyak mentah (*crude oil*).[8]

Kemudian dengan adanya gangguan keamanan yaitu pemberontakan ISIS, maka ini mampu menyebabkan kerugian serius bagi perekonomian Amerika Serikat, khususnya ketahanan energi. Sejak merebaknya pemberontakan ISIS pada tahun 2013 kebutuhan minyak Amerika Serikat meningkat menjadi 28 persen akibat kurangnya pasokan dari Irak.

[8] Anonim, "World Oil Concumption :United States of America", OPEC Report Paper 2014. Vol IV, Ohio, 2014, chapter ix.

Kemudian di tahun 2014 tingkat kebutuhan minyak meningkat menjadi 32 persen dan ini menimbulkan kerugian sekitar 13,8 juta US Dollar akibat meningkatnya harga minyak di Amerika Serikat.[9] Ini menunjukkan bahwa munculnya pemberontakan ISIS mampu mempengaruhi dinamika ekspor minyak Irak ke Amertika Serikat.

Melalui uraian tersebut maka dapat difahami bahwa pemberontakan ISIS di Irak telah menganggu kepentingan nasional Amerika Serikat di negara ini. Persoalan keamanan di Irak memang telah menjadi prioritas bagi kepentingan Amerika Serikat setelah negara ini. Pasca berakhirnya program invasi Amerika Serikat bersama dengan pasukan multinasional, harapan tentang akan dapat terciptnya yaitu berkaitan dengan jatuhnya rezim Saddam Hussein sebagai figur otoriter dan kemudian berlanjut dengan orientasi demokratisasi yang ditawarkan oleh Amerika Serikat beserta dengan negara-negara Barat lainnya.

Dengan adanya pemberontakan ISIS maka kepentingan tentunya akan terganggu dan akan sulit untuk terealisasi. Inilah yang menjadi kepentingan dan motivasi bagi pihak Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama untuk ikut mendukung penanganan pemberontakan ISIS di Irak.

Kemudian melalui uraian di atas dapat difahami bahwa kepentingan Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIS di Irak juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Di tahun 2008, pasca invasi ke Irak oleh Amerika Serikat berakhir harapan baru atas kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder) ekonomi dari Amerika Serikat muncul. jatuhnya rezim Saddam Hussein sebagai figur otoriter diharapkan dapat menjadi peluang bagi berkembangnya nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme, namun adanya pemberontakan ISIS maka kepentingan tentunya akan terganggu dan akan sulit untuk terealisasi. Inilah yang menjadi kepentingan dan motivasi bagi pihak Amerika Serikat di

[9] "Irak Berkobar, AS Alami Rugi Besar", Kompas, 8 November 2014.

bawah kepemimpinan Barack Obama untuk ikut mendukung penanganan pemberontakan ISIS di Irak.